

## ABSTRAK

Akibat hukum setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Akibat hukum lainnya setelah terjadinya perkawinan adalah percampuran harta benda. Perkawinan campuran di Indonesia, merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi, Salah satu contoh perkawinan campuran yang mengajukan permohonan untuk menyelesaikan persoalan akibat perkawinan terhadap harta benda adalah perkawinan campuran antara Safira Annur SR Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Ross Michael Robertson Warga Negara Asing (WNA) asal Inggris. yang telah diputus dengan Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel. Safira Annur SR selaku istri dan Ross Michael Robertson selaku suami melakukan permohonan ke pengadilan negeri jakarta selatan terkait perjanjian pernikahan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, termasuk asas-asasnya. Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif.

Pengaturan harta suami dan istri baik dengan atau tanpa perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran berpedoman pada Undang-undang Perkawinan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin sungguh sangat menghambat untuk dapat memiliki harta sendiri selama perkawinannya di karenakan pembulatan harta bersama yang mana di dalam harta bersama termasuk harta warga Negara asing. Adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta No. 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan permohonan mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan, mengakibatkan adanya perubahan hukum terhadap perkawinan campuran antara Safira Annur SR (pemohon I) dan Ross Michael Robertson (pemohon II). Akibat hukum terhadap harta suami dan istri dalam perkawinan campuran dengan dibuatnya akta perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel) adalah Setelah keluar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 269/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel, suami istri dapat mengadakan perjanjian kawin di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau dengan akta Notaris berdasarkan KUH Perdata.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran

## **ABSTRACT**

*The legal consequences after the occurrence of a marriage are the relationship between husband and wife, especially those concerning rights and obligations. Another legal consequence after marriage is the mixing of property. Mixed marriage in Indonesia is a familiar phenomenon. One example of a mixed marriage that submitted an application to resolve problems due to marriage to property is a mixed marriage between Safira Annur SR, an Indonesian citizen (WNI) and Ross Michael Robertson, a foreigner (foreigner) from England. which has been decided by Decree Number 256/Pdt.P/2021/PN Jkt. Cell. Safira Annur SR as the wife and Ross Michael Robertson as the husband made an application to the South Jakarta District Court regarding the marriage agreement.*

*This study uses normative legal research. Normative legal research is the study of law as a system of abstract rules, including its principles. The type of data used in writing this law is secondary data. This study used data collection techniques, namely library research. This study uses a qualitative method. Data analysis in this research is descriptive qualitative.*

*The management of husband and wife assets, whether with or without a marriage agreement in mixed marriages, is guided by the current Marriage Law, namely Law No. 1 of 1974. Mixed marriages without a marriage agreement really hinder them from being able to have their own assets during their marriage due to the rounding up of joint assets which in joint assets include the assets of foreign nationals. The Jakarta District Court Decree No. 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel which granted the request to enter into a marriage agreement after marriage, resulting in a change in law against mixed marriages between Safira Annur SR (applicant I) and Ross Michael Robertson (applicant II). Legal consequences for the assets of husband and wife in mixed marriages by making a marriage agreement deed after the marriage takes place (Case Study of South Jakarta District Court Decision Number 269/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel) is after the Jakarta District Court Decision Number 269 is issued /Pdt. P/2021/PN. Jkt. Sel, husband and wife can enter into a private marriage agreement based on the Marriage Law No. 1 of 1974 or with a notarial deed based on the Civil Code.*

*Keywords: Legal Consequences, Marriage Agreement, Mixed Marriage*